

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dibahas tentang manajemen obyek wisata Pantai Toronipa ditinjau dari prespektif ekonomi syariah, adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Damai Rianingsih tentang Strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Konawe, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Konawe. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana subjek penelitian ini yaitu kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, tokoh masyarakat pantai pesisir Batu Gong, Pantai Toronipa, Pantai Samudera, Permandian Air Nesowi Latoma, Pulau Bokori, Wisata Alam Abuki.<sup>1</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan daerah pesisir di Kabupaten Konawe dimulai dengan menentukan prioritas pengembangan pantai. Dari beberapa wisata yang ada di Kabupaten Konawe beberapa pengelolaannya dengan berdasarkan tiga pilar yakni pilar *good Governance* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konsep ideal tersebut ternyata belum optimal akibat permasalahan yang timbul. Pengembangan daerah pesisir pantai diharapkan dapat memberikan pendapatan asli daerah yang optimal,

---

<sup>1</sup> Mifta Damai Rayaningsih, "Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Konawe." ( Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, Kendari, 2014), h 50

meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk kesamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang akan digunakan dengan menggunakan metode kualitatif, selain itu lokasi penelitian peneliti yang hampir sama letaknya yakni penelitian ini dilakukan di kabupaten Konawe, akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkhusus di Pantai Toronipa.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata Kota Tua Jakarta Berbasis Masyarakat” skripsi oleh Rizki Pahrani. Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa secara umum keterlibatan masyarakat dalam manajemen objek wisata Kota Tua Jakarta yaitu masyarakat yang dilibatkan dalam pengarahan dan pengawasan. Sedangkan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengkoordinasian masyarakat atau komunitas yang ada di kota Tua Jakarta tidak ikut dilibatkan secara aktif. Selain itu proses keterlibatan masyarakat dalam membuat aturan terkait manajemen pengelolaan obyek wisata kota tua Jakarta tidak sepenuhnya ikut dilibatkan didalamnya namun yang berwenang adalah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata Kota Tua Jakarta yaitu komunitas- komunitas yang ada di taman Fatahillah kota Jakarta.<sup>2</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Rizky “Pengelolaan Obyek Wisata Lumpur Lapindo Presfektif Muqasid Syariah”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

<sup>2</sup> Pahrani Rizki, “Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Kota Tua Jakarta Berbasis Masyarakat” ( Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2016), h. 48.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa pengelolaan yang ada dalam obyek wisata belum mendapatkan izin baik dari PT. Lapindo maupun dari pemerintah daerah, untuk tarif retribusinya sudah menjadi kesepakatan panguyuban wisata lumpur Lapindo. Selain itu pendapatan yang didapatkan dari obyek wisata lumpur lapindo jasa ojek menjadikan penghasilan pribadi namun penjagaan portal atau karcis ada bagi rata antara penjaga sesuai pos penjaga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Rizky terdapat kesamaan yaitu ditinjau dari pendekatan agama. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kawasan lumpur Lapindo diperbolehkan karena menjadi kemaslahatan hidup warga korban untuk mendapatkan penghasilan walaupun pengelolaannya secara resmi tidak berizin, sedangkan pengelolaan obyek wisata pantai Toronipa pengelolaan sepenuhnya oleh pemilik lahan baik penyediaan fasilitas dan sebagainya, tanpa melibatkan atau membuka lapangan kerja yang luas karena pengelolaannya sistem keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rizky Widya Ayu, "Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Prespektif Muqasid Syariah, (Skripsi sarjana, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016) , h. 69

## B. Manajemen Obyek Wisata

### 1. Pengertian Obyek Wisata

Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek wisata harus di rancang dan di bangun atau di kelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu obyek wisata harus di rancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang tepat dengan daerah wisata tersebut. Obyek wisata umumnya berdasarkan pada:<sup>4</sup>

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka
- d. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
- e. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Menurut Yoeti, suatu daerah untuk menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baik, harus membangun tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Salah Wahab, *Manajemen Keprawisataan* ( Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), h. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 14.

- a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapatkan perhatian terhadap antraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai *entertainment* bila orang berkunjung nantinya.
- b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yakni terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk dibawa pulang ketempat masing-masing sehingga daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan *souvenir* maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya.
- c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*) yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan ditempat yang bisa membuat orang yang berkunjung betah di tempat tersebut.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.<sup>6</sup>

Selain itu, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataaan dijelaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Ismayanti, *Pengantar Keparawisaan*. (Jakarta: Efarindo, 2011), h. 3

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.<sup>7</sup>

Menurut Fandeli wisata adalah perjalanan atau sebagai kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Daya tarik wisata juga disebut obyek wisata yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek daya tarik wisata harus dirancang dan dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang.

Daya tarik wisata itu harus dikelola sedemikian rupa agar keberlangsungannya dan kesinambungannya terjamin. Adapun daya tarik wisata sebagai berikut :

- a. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, dan tempat hiburan.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaannya, perlu dikembangkan pula “*Collaborative Management*” antara Instansi-Instansi yang berkepentingan (lintas sektor) dengan maksud untuk tetap menjaga kelestarian sejarah dan budaya yang ada. Adapun

<sup>7</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan.”, h. 4

<sup>8</sup> Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 80.

<sup>10</sup> Mulyadi A.J , *Keprawatan dan Perjalanan*. (Jakarta: Rajawali Press), h. 30

pola-pola kerjasama lintas sektor yang harus dikembangkan untuk pengelolaan obyek wisata ini adalah dengan semangat 4 (empat) M:

- a. *Mutual respect* (saling menghormati)
- b. *Mutual trust* (saling percaya)
- c. *Mutual responsibility* (saling bertanggung jawab)
- d. *Mutual benefit* (saling memperoleh manfaat).

## 2. Sarana Prasarana Dalam Obyek Wisata

### 1.1 Sarana Obyek Wisata

Sarana obyek wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata kuantitatif menunjukkan pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standart wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakannya. Sarana pariwisata dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sarana Pokok obyek wisata

Sarana Pokok obyek wisata adalah obyek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

b. Sarana Pelengkap Pariwisata

Sarana Pelengkap obyek wisata adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan tujuan wisata.

c. Sarana Penunjang obyek wisata

Sarana Penunjang obyek wisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok yang berfungsi untuk membuat wisatawan betah di daerah tujuan wisata.<sup>9</sup>

1.2 Prasarana obyek wisata ( *tourism infrastructure* )

Prasarana obyek wisata adalah semua fasilitas yang tersedia yang memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Prasarana pariwisata tidak jauh berbeda dengan prasarana dalam perekonomian pada umumnya. termasuk prasarana pariwisata:

- a) Prasarana perhubungan, meliputi: jalan raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara (air-port) dan pelabuhan laut (sea port/harbour)
- b) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c) Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, faksimili, telex, e-mail, dan lain.
- d) Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
- e) Prasarana keamanan, pendidikan, kebersihan dan hiburan.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek\\_wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata) akses23 jan 2017



## 2. Fungsi Dan Tujuan Obyek Wisata

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan berupa materi dan nonmateri dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan/pengabdian (*public organization*) melalui proses manajemen itu.<sup>10</sup>

Pembagian fungsi- fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen, seperti: Menurut George R. Terry fungsi manajemen seperti *Planning; Organizing; Acuanting; controlling*. Menurut Dr. S.P. Siagian fungsi manajemen seperti, *Planning; Organizing; motivating; controlling; evaluating*. Menurut Luther Gullick terdiri dari: *Planning; Organizing; Staffing; Directing; Coordinating; Reporting; Budgeting*. Menurut Henry Fayol tahapannya seperti *Planning; Organizing; Commanding; Coordinating Controlling*. Menurut Harold Koontz & Cyril O'Donnel seperti: *Planning; Organizing; Staffing; Directing; Controlling*.<sup>11</sup>

Dalam Penelitian ini, fungsi-fungsi manajemen yang digunakan adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry mendiskripsikan manajemen berdasarkan fungsinya yakni perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakkan (*Actuating*), pengawasan (*Controlling*).

Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara ,2009) , h. 17.

<sup>11</sup> *ibid* . h. 38.

1) Fungsi perencanaan (*planning*)

perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditetapkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tidak adanya perencanaan maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.<sup>12</sup>

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha mengerakan anggota-anggota sekelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dari usaha untuk mencapai sasaran obyek wisata dan sasaran anggota-anggota pengelola obyek wisata tersebut oleh karena anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

4) Pengawasan (*controlling*)

*Controlling* atau pengawasan merupakan fungsi manajerial dasar yang sengaja didesain untuk maksud tertentu sesuai dengan tujuan kontrol yang

---

<sup>12</sup> Leavitt, Harold. *Psikologi Manajemen*, (Jakarta, Erlangga, 1978), h. 89.

diharapkan, sehingga manajer dapat mengetahui efektivitas sumber-sumber informasi yang ada dalam organisasinya, efektivitas aktifitas kelompok, serta efektivitas aktifitas setiap individu anggota organisasinya.<sup>13</sup>

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemen yang dilakukan. Pekerjaan ini akan berhasil apabila manajemennya baik atau teratur, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Serangkaian tahapan kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan.

## 2.1 Fungsi Perencanaan Obyek Wisata

Menurut George R. Terry perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.<sup>14</sup>

Adapun menurut Heidjrachman Ranupandojo, perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilannya.<sup>15</sup> Perencanaan disini menekankan pada perencanaan secara implisit, mengandung arti penentuan tujuan, pengembangan kebijakan, program, sistem dan prosedur, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

<sup>13</sup> Rahmat, *Definisi Manajemen*, disalin dari website: <http://blog.re.or.id/definisi-manajemen.htm> diakses 10 januari 2017

<sup>14</sup> Wibowo. *Manajemen Perubahan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 65.

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 43.

Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relative kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu, ada 4 tahapan perencanaan:

- a) Menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan pengelola obyek wisata. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, penggunaan sumber daya obyek wisata tidak efektif.
- b) Merumuskan keadaan suatu saat, Pemahaman akan dikondisikan pengelolah sekarang dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan perencanaan menyangkut masa yang akan datang. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik.
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi, untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dalam dan luar yang dapat membantu pengelolah mencapai tujuan, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi diwaktu mendatang, adalah bagian penting dalam proses perencanaan.
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan

berbagai pilihan kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian pilihan kegiatan terbaik (paling memuaskan) diantara pilihan yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang disusun untuk menjalani fungsi-fungsi manajemen yang lain. Kegiatan- kegiatan ini disusun bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini akan dilihat perencanaan yang dilakukan oleh para pengelola obyek wisata (pemilik lahan, pengelola PAD obyek wisata pantai Toronipa, pemerintah kelurahan Toronipa). Akan dilihat proses dari perencanaan tersebut, program apa saja yang dilakukan dalam perencanaan dan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan tersebut.

## 2.2 Fungsi Pengorganisasian Obyek Wisata

Menurut George R. Terry organisasi adalah proses mengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penguasaan setiap kelompok kepada seorang<sup>3</sup> manajer, yang mempunyai kekuasaan,yang perlu mengawasi anggota- anggota kelompok. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.<sup>16</sup>

Fungsi *organizing* adalah fungsi pimpinan untuk menetapkan dan mengatur kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan, mengadakan pembagian pekerjaan, menempatkan orang-orang yang berwenang pada kesatuan

---

<sup>16</sup> Dominick Salvatore. *Manajerial Economics Dalam Perekonomian Global*, (Jakarta; PT. Erlangga, 2002), h. 56.

organisatoris atau departemen serta menetapkan batas-batas wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.<sup>17</sup> Artinya fungsi pengorganisasian yang menghasilkan organisasi bukanlah dan tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Pengorganisasian mempermudah pengelola dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan penataan dari anggota. Hal pokok yang perlu diperhatikan dari pengorganisasian:

- 1) Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi
- 2) Menganalisis beban kerja masing- masing satuan organisasi
- 3) Membuat *job description* (uraian pekerjaan)
- 4) Menentukan seseorang atau karyawan yang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja, dan uraian kerja dari masing- masing satuan organisasi.<sup>18</sup>

Proses pengorganisasian berarti menempatkan orang dan prasarana serta sarana dan sumber daya dalam suatu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran bersama. Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian menunjukkan adanya pembagian tugas dan penempatan sarana yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini akan dilihat bentuk pengorganisasia yang dilakukan oleh para pengelola yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kemajuan pariwisata pantai Toronipa berdasarkan tugas masing-masing.

---

<sup>17</sup> Yayu indrawati , *Pengembangan Manajemen Daya Tarik Berbasis Quality Experiences Di Objek Wisata Ala Kedaton Tambanan* 2009 diakses 20 desember 2016

<sup>18</sup> <http://wawanhariskurnia.blogspot.com/2012/12/fungsi-pengorganisasian-dalam-manajemen.html>. diakses 20 januari 2017

### 2.3 Fungsi Pelaksanaan (*acuating*) Obyek Wisata

George R. Terry mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha mengerakan anggota-anggota sekelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dari usaha untuk mencapai sasaran obyek wisata dan sasaran anggota-anggota pengelola obyek wisata tersebut oleh karena anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan merupakan tindakan untuk membuat perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibuat, teraplikasi dalam oprasional perusahaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.<sup>19</sup>

Pelaksanaan atau penggerakan (*acuating*), dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit/ satuan kerja yang dibentuk. Diantara kegiatannya adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi. Pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga, mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara structural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Trisnawati Sule Ernie, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Jakarta 2005), h. 8.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 34.

Jadi, dalam sebuah organisasi, fungsi pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang teramat penting karena secara langsung berkaitan dengan manusia yang memiliki segala jenis kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*acuanting*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *acuanting* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dari pengertian diatas, pelaksanaan (*acuanting*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penelitian ini akan dilihat bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh para pengelola dalam meningkatkan pengembangan obyek wisata pantai Toronipa dan masyarakat yang memiliki lahan dalam kawasan obyek wisata pantai Toronipa yang mereka kelolah secara pribadi.

#### **2.4 Fungsi Pengawasan Obyek wisata**

Pengawasan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun pada awal dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan, apakah terjadi penyimpangan atau telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah proses dalam menentukan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut. Menurut George R. Terry :



“*Controlling* atau pengawasan merupakan fungsi manajerial dasar yang sengaja didesain untuk maksud tertentu sesuai dengan tujuan kontrol yang diharapkan, sehingga manajer dapat mengetahui efektivitas sumber-sumber informasi yang ada dalam organisasinya, efektivitas aktifitas kelompok, serta efektivitas aktifitas setiap individu anggota organisasinya”.<sup>21</sup>

Menurut Komaruddin pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dapat segera mengadakan perbaikan dari penyimpangan, sesaat atau beberapa saat sesudah penyimpangan terjadi. Tujuan utama dari pengawasan untuk mencari dan memberitahu kelemahan-kelemahan yang dihadapi, dimaksud untuk menghindarkan pengertian negatif.<sup>22</sup>

Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kegiatan pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. Oleh karena itu, pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dapat berjalan dengan baik.

<sup>21</sup> Rahmat, *Definisi Manajemen*, disalin dari website: <http://blog.re.or.id/definisi-manajemen.htm> diakses 10 januari 2017

<sup>22</sup> Silalahi, *Pengantar manajemen , teori dan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta,1996) , h. 87.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan peyelewatan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak lain yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

### **C. Manajemen Obyek Wisata Menurut Islam**

#### **1. Pengertian Manajemen Wisata Dalam Islam**

Dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (تدبير – سياسة-) yang bersal dari lafadz ( – – ). Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (Al-Idarah) ialah manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan

bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.<sup>23</sup>

Dari ta'rif di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai pekerjaan masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan (makna) wisata.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang seseorang yang bepergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih anda sukai? Beliau menjawab: "Wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga perilaku para nabi dan orang-orang saleh".

Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan: "Wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal itu. Kemudian Islam datang

---

<sup>23</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68.

untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Di antaranya;

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta'ala dalam setahun.

Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah”. (HR. Abu Daud).

2. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang terkenal ‘Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits’, di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits saja.
3. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Allah berfirman dalam, QS. An-Naml: 69:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

Terjemahannya: “Katakanlah: ‘Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.’” (QS. An-Naml: 69).<sup>24</sup>

4. Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah Ta’ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para shahabat semoga, Allah meridhai mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar.

5. Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta’la, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiabn hidup. Karena *refresing* jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

Terjemahannya: “Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penterjemah Al- Quran,1978), h. 602

menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)<sup>25</sup>

## 2. Aturan Wisata Dalam Islam

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum-hukum itu adalah:<sup>26</sup>

- a. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu sesungguhnya Nabi sallallahu'alai wa sallam bersabda:

مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَفْصَى

))

Artinya: “ Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu'alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha.” (HR. Bukhari, no. 1132, Muslim, no. 1397)

Hadits ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan Wisata Religi ke selain tiga masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang diagungkan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membinasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengagungan pada

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penterjemah Al- Quran,1978), h. 631

<sup>26</sup> Ahmad Ibrahi Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal 30

tempat tertentu dengan menunaikan ibadah di dalamnya sehingga menjadi tempat yang di agungkan selain tiga tempat tersebut..

Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, "Aku pergi Thur (gunung Tursina di Mesir), kemudian aku bertemu Ka'b Al-Ahbar, lalu duduk bersamanya, lalu beliau menyebutkan hadits yang panjang, kemudian berkata, "Lalu aku bertemu Bashrah bin Abi Bashrah Al-Ghifary dan berkata, "Dari mana kamu datang?" Aku menjawab, "Dari (gunung) Thur". Lalu beliau mengatakan, "Jika aku menemuimu sebelum engkau keluar ke sana, maka (akan melarang) mu pergi, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jangan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, ke Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjid Iliyya atau Baitul Maqdis." (HR. Malik dalam Al-Muwatha, no. 108. Nasa'i, no. 1430, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasa'i)

Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tiga tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-masjid yang ada di negara muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, bahkan dianjurkan. Akan tetapi yang dilarang adalah melakukan safar dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain dalam safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke masjid, maka hal itu tidak mengapa. Bahkan terkadang diharuskan untuk menunaikan jum'at dan shalat berjamaah. Yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat suci agama lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Budha atau lainnya yang serupa.

- b. Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seorang muslim ke negara kafir secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak seorang muslim, akibat bercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan akhlak. Khususnya apa bila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang atau semisalnya, kecuali hanya sekedar bersenang senang dan rekreasi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-Nya, sehingga tidak perlu pergi ke negara orang kafir.

Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah berkata: “Tidak boleh Safar ke negara kafir, karena ada kekhawatiran terhadap akidah, akhlak, akibat bercampur dan menetap di tengah orang kafir di antara mereka. Akan tetapi kalau ada keperluan mendesak dan tujuan yang benar untuk safar ke negara mereka seperti safar untuk berobat yang tidak ada di negaranya atau safar untuk belajar yang tidak didapatkan di negara muslim atau safar untuk berdagang, kesemuanya ini adalah tujuan yang benar, maka dibolehkan safar ke negara kafir dengan syarat menjaga syiar keislaman dan memungkinkan melaksanakan agamanya di negeri mereka. Hendaklah seperlunya, lalu kembali ke negeri Islam. Adapun kalau safarnya hanya untuk wisata, maka tidak dibolehkan. Karena seorang muslim tidak membutuhkan hal itu serta tidak ada manfaat yang sama atau yang lebih kuat dibandingkan dengan bahaya dan kerusakan pada agama dan keyakinan.

- c. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti di pinggir pantai yang bebas dan acara-acara bebas



dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan bid'ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan jangan duduk dengan orang yang melakukan itu.

Para ulama Al-Lajnah Ad-Daimah juga berkata: “Kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran serta mengajak kesana, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari Akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahNya. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu.

- d. Adapun berkunjung ke bekas peninggalan umat terdahulu dan situs-situs kuno, jika itu adalah bekas tempat turunnya azab, atau tempat suatu kaum dibinasakan sebab kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dibolehkan menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata dan hiburan.
- e. Tidak dibolehkan juga wanita bepergian tanpa mahram. Para ulama telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umrah tanpa mahram.
- f. Adapun mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam, asalnya dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya di negara Islam harus terikat dan menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaannya. Dia pun di larang mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh Islam dengan batil. Mereka

juga tidak boleh keluar kecuali dengan penampilan sopan dan memakai pakaian yang sesuai untuk negara Islam, bukan dengan pakaian yang biasa dia pakai di negaranya dengan terbuka dan tanpa baju. Mereka juga bukan sebagai mata-mata atau spionase untuk negaranya. Yang terakhir tidak diperbolehkan berkunjung ke dua tempat suci; Mekkah dan Madinah.

Tidak tersembunyi bagi siapa pun bahwa dunia wisata sekarang lebih dominan dengan kemaksiatan, segala perbuatan buruk dan melanggar yang diharamkan, baik sengaja bersolek diri, telanjang di tempat-tempat umum, bercampur baur yang bebas, meminum khamar, memasarkan kebejatan, menyerupai orang kafir, mengambil kebiasaan dan akhlaknya bahkan sampai penyakit mereka yang berbahaya. Belum lagi, menghamburkan uang yang banyak dan waktu serta kesungguhan. Semua itu dibungkus dengan nama wisata. Maka ingatlah bagi yang mempunyai kecemburuan terhadap agama, akhlak dan umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai menjadi penolong untuk mempromosikan wisata fasik ini. Akan tetapi hendaknya memeranginya dan memerangi ajakan mempromosikannya. Hendaknya bangga dengan agama, wawasan dan akhlaknya.

### **3. Macam-Macam Obyek Wisata Islam**

Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Wisata Budaya Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari

keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

- b. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik itu alami maupun budidaya.
- c. Wisata Ziarah, Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

#### **4. Fungsi Manajemen Obyek Wisata Menurut Islam**

Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya; *Pertama* ( ) atau Planning; yaitu perencanaan merupakan gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu, metode tertentu. Sebagaimana Nabi telah bersabda:

(إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, tearah, jelas, tuntas)*”. (HR. Thabrani).

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah SWT. Kedua, ( ) atau Organization; merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً ۗ

terjemahannya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan... (Ali Imran; 103)*<sup>27</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu-padulah dalam bekerja dan memegang kometmen untuk menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi dimaksud. Allah berfirman;

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penterjemah Al- Quran,1978), h. 93.

*terjemahannya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.... (Al-Baqarah; 286).*<sup>28</sup>

Kinerja bersama dalam organisasi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam berkarya. Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat statemen yang terkenal yaitu; Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal.<sup>29</sup> Ketiga, ( ) atau *actuating*, upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan perencanaan dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman;

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*terjemahannya;” Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata”. (Al-Baqarah; 208)*<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penterjemah Al- Quran,1978), h. 72

<sup>29</sup><http://ruang-ihsan.blogspot.co.id/2009/09/manajemen-menurut-islam-beserta.html>  
diakses 20 januari 2017

<sup>30</sup> *Op, cit* h. 50

Apabila manusia ingin mendapat predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman bila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai *planning* dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya kordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan, namun dengan manusia tenggelam dalam lautan Islam (kedamaian, kerjasama dan hal-hal baik lainnya) akan terlepas dari kendala-kendala yang siap mengancam. Keempat, ( ﴿ ٤ ٥ ﴾ ) atau *Controlling* , pengamatan dan penelitian terhadap jalannya *planning*. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٤٥﴾

terjemahannya; Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Q.S. Ash-Shoff; 2)<sup>31</sup>

Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S At- Tahrim; 6)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penterjemah Al- Quran,1978), h. 928.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 951

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi secara universal. Bagaimana manajer bisa mengawasi orang lain sementara dirinya masih belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer orang terbaik dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik.

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa kontrol yang utama ialah dari Allah SWT.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ..... ﴿٧﴾

*terjemahannya: Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi... (Al-Mujadillah; 7)*<sup>33</sup>

Dalam konteks ayat ini sebenarnya sangat cukup sebagai konsep kontrol yang sangat efektif untuk diaplikasikan. Memahami dan membumikan konteks ayat ini menjadi hal yang sangat urgen. Para pelaksana institusi akan melaksanakan tugasnya dengan konsisten sesuai dengan sesuatu yang diembannya, bahkan lebih-lebih meningkatkan spirit lagi karena mereka menganggap bahwa setiap tugas pertanggung jawaban yang paling utama adalah kepada Sang Khaliq yang mengetahui segala yang diperbuat oleh makhluk-Nya.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penterjemah Al- Quran,1978), h. 909.

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek\\_wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata) diakses 20 januari 2017

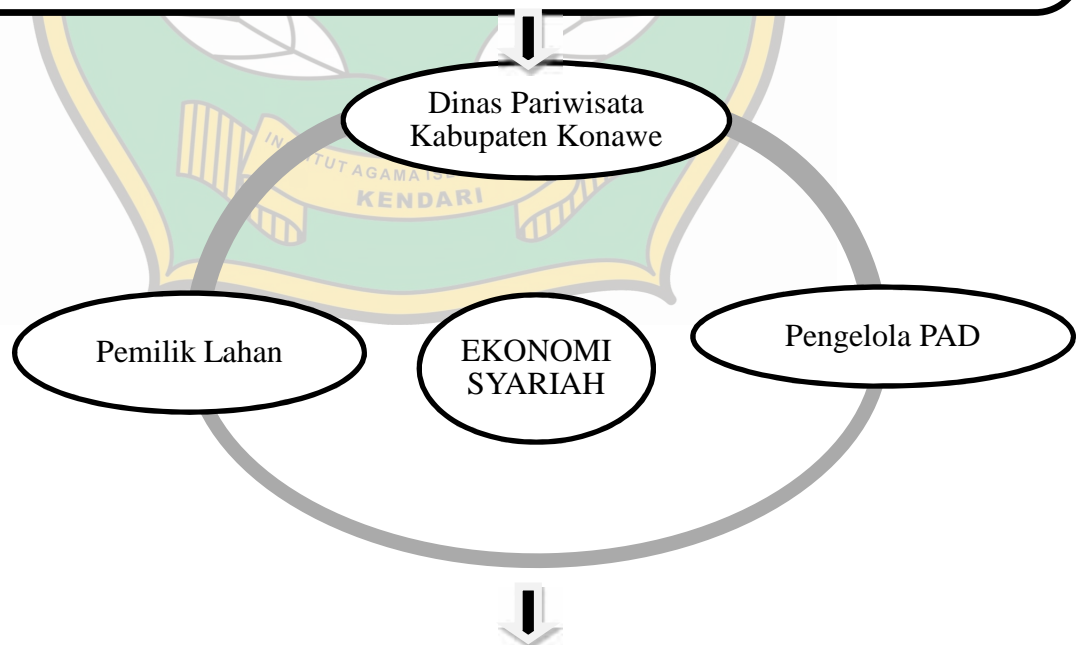
#### D. Kerangka Berpikir Peneliti

##### Masalah

1. Pengelolaan objek wisata dikelola oleh masing-masing pemilik lahan dan pengelola PAD hanya bertindak sebagai pemungut karcis masuk objek wisata
2. pengorganisasian yang ada dikawasan objek wisata pantai Toronipa diatur oleh masing- masing pemilik lahan
3. kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata Kab. Konawe, pengelola PAD, pemilik lahan
4. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pengelola

Teori yang digunakan yaitu mengenai fungsi manajemen menurut George R. Terry:

1. Fungsi perencanaan (*planning*)
2. Fungsi pengorganisasian (*organizing*)
3. Fungsi pelaksanaan (*acuating*)
4. Fungsi pengawasan (*controlling*)



Mengambarkan Bagaimana Manajemen Objek Wisata Pantai Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian manajemen obyek wisata Pantai Toronipa, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran manajemen obyek wisata Pantai Toronipa ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah.

“Sebagaimana Husaini Usman menegaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif penelitian sendiri”.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan manajemen obyek wisata Pantai Toronipa ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah kepada narasumber yang terkait dengan penelitian

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pantai Toronipa Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas keingintahuan tentang manajemen obyek wisata Pantai Toronipa di masa yang akan datang serta kemajuan pengelola pantai dalam mengelolah obyek wisata

---

<sup>1</sup> Husaini Usman , *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 81